

PEMANFAATAN PETA TEMATIK DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
PENDUKUNG PARIWISATA DAERAH  
DI KECAMATAN SIDAMULIH DAN KECAMATAN PANGANDARAN,  
KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



OLEH :

RIZKA FAKHRIZATULLAH

NIM. 14232864 / PERPETAAN

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

2018

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
INTISARI.....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan permasalahan.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Kerangka Teoritik .....	9
B. Kerangka Konseptual.....	14
C. Hipotesis Penelitian .....	20
BAB III .METODE PENELITIAN .....	21
A. Format Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian .....	21
C. Jenis dan Sumber Data.....	21
1. Data Primer .....	21
2. Data Sekunder .....	23
D. Populasi dan Sampel .....	23
E. Langkah Kerja Operasional .....	24
1. Pengumpulan data dan Observasi.....	24
2. Penghitungan dan skoring variabel.....	24
3. <i>Overlay</i> peta-peta tematik .....	28
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	30
A. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi.....	30
1. Kondisi Geografis.....	30
2. Wilayah Administrasi .....	31
B. Kondisi Fisik dan Kependudukan.....	35
1. Topografi .....	35
2. Jenis Tanah.....	37
3. Kependudukan.....	38
4. Penggunaan Lahan.....	41

5. Kepemilikan tanah.....	43
6. Perekonomian.....	43
7. Potensi Pariwisata.....	46

<b>BAB V. JENIS SARANA DAN PRASARANA SERTA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG PARIWISATA DAERAH .....</b>	<b>48</b>
A. Pengumpulan data.....	48
B. Hasil Wawancara .....	49
C. Sarana dan Prasarana. ....	53
1. Sarana Kesehatan .....	54
2. Sarana Perekonomian .....	56
3. Sarana Hiburan.....	61
4. Sarana Telekomunikasi.....	63
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sebaran Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Daerah .....	66
1. Penggunaan Lahan.....	66
2. Jaringan Jalan.....	69
3. Tingkat Kepadatan Penduduk .....	74
4. Tingkat Kerawanan Bencana .....	77
a. Bencana Banjir.....	78
b. Bencana Tanah Longsor.....	79
c. Bencana Tsunami.....	81
d. Bencana Cuaca Ekstrim.....	82
e. Bencana Gempa Bumi.....	83
5. Jumlah Objek Wisata.....	85
6. Tingkat Kemiringan Lahan .....	90

<b>BAB VI. DAERAH YANG BERPOTENSI UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA DAERAH .....</b>	<b>93</b>
A. Penentuan Kelas dan Skoring .....	93
1. Sarana dan Prasarana .....	95
a. Sarana Kesehatan .....	95
b. Sarana Perekonomian.....	96
c. Sarana Hiburan .....	98
d. Sarana Telekomunikasi .....	100
2. Penggunaan Lahan.....	101
3. Jumlah Jaringan Jalan .....	103
4. Tingkat Kepadatan Penduduk .....	104
5. Tingkat Rawan Bencana .....	106
a. Bencana Banjir.....	106
b. Bencana Tanah Longsor.....	108
c. Bencana Tsunami.....	109
d. Bencana Cuaca Ekstrim.....	111
e. Bencana Gempa Bumi.....	112
6. Jumlah Objek Wisata.....	114
7. Kemiringan Lahan .....	115
B. Pembuatan Peta Tematik .....	118
1. Mengedit Atribut .....	119
2. <i>Join</i> Atribut .....	120
3. Membuat Layout Peta.....	122

BAB VII. PENUTUP .....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran .....	124
DAFTAR-PUSTAKA .....	126
LAMPIRAN .....	129

## ABSTRACT

Pangandaran District is one of the districts that have the greatest tourism potential in Indonesia. Pangandaran District has a coastline along the 91 kilometers so that the largest tourist potential in Pangandaran District is the marine tourism of beach. As a new area of regional autonomy, Pangandaran District was required to develop the region in the tourism sector is emphasized on the provision of facilities and infrastructure associated with the tourism sector. This study aims to determine the distribution of facilities and infrastructure as well as to know the factors that influenced the distribution to determine the appropriate area for regional development in the tourism sector.

The research used quantitative approach with library method and interview. Library method was done by collecting data of region and thematic map that exist in subdistrict Sidamulih and subdistrict Pangandaran. Interview were conducted to supplement the lack of information. The resulting thematic data and maps are then analyzed to obtain the amount of distribution of facilities and infrastructure and the factors that influence them in each village unit. The analytical methods were using the scoring method to generate thematic maps that have been planned will be made. Then thematic maps were overlaid and produced zonation map of the area of development of facilities and infrastructure supporting regional tourism in Sidamulih and Pangandaran Subdistricts.

The result of the research shows that there are 4 main supporting facilities and infrastructures of regional tourism: (1) health facilities; (2) economic means; (3) entertainment facilities; and (4) telecommunication facilities. As well as factors affecting the distribution of facilities and infrastructure are (1) land use; (2) the number of road networks; (3) population density; (4) the level of flood disaster; (5) the degree of vulnerability of landslides; (6) the level of vulnerability of tsunami disaster; (7) the extent of extreme weather catastrophe; (8) the degree of earthquake disaster; (9) number of attractions; and (10) the level of land slope. Areas that have the biggest potential for the development of facilities and infrastructure supporting regional tourism are the villages that are on the surrounding Pangandaran beach.

**Keywords : Tourism, facilities and infrastructure, thematic maps.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia menyimpan banyak kekayaan baik alam maupun budaya yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan potensi dan nilai jual tinggi. Salah satu sektor paling berperan penting dalam pembangunan Indonesia adalah sektor pariwisata. Kekayaan tersebut mampu menjadikan Indonesia memiliki modal dalam sektor pariwisata yang sangat baik. Pada masa sekarang ini, sektor pariwisata menjadi sektor andalan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang cukup potensial dalam pengembangan daerah karena sektor ini bisa menjadi salah satu daya tarik bagi suatu daerah dalam menarik wisatawan untuk peningkatan pendapatan daerah. Program-program dalam pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai modal untuk pembangunan daerah. Menurut Andi Mappi Sammeng, seperti halnya dengan sektor lainnya pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah atau negara tujuan wisata. Besar kecilnya pengaruh itu berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya atau antara suatu negara dengan negara lainnya (Rahmadkk, 2013;1).

Pariwisata sendiri dimulai dari naluri manusia yang selalu ingin bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya dan kurang merasa puas jika harus berada di suatu tempat saja. Mobilitas merupakan salah satu sifat hakiki manusia itu sendiri yang tidak pernah bisa puas terpaku pada suatu tempat untuk memenuhi tuntutan kelangsungan hidupnya (Spillane,1987;13). Pada jaman dahulu manusia bepergian dalam rangka untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingannya saja, misalnya pada jaman Mesir purba manusia berkunjung dari suatu tempat ke tempat lain dalam rangka hanya terbatas pada kegiatan

keagamaan dan ritual-ritual kepercayaan. Seiring perkembangan jaman, manusia kemudian membagi pola pikirnya antara bekerja dan bersantai, sehingga manusia mulai melakukan kegiatan mengunjungi suatu tempat tidak hanya untuk bekerja atau melakukan suatu kepentingannya saja, tetapi juga untuk bersantai. Bagi masyarakat di jaman modern sekarang ini faktor jarak, waktu, dan sarana tidak lagi merupakan masalah besar sehingga banyak sekali masyarakat yang meluangkan waktu khusus untuk melakukan wisata ke suatu tempat lain.

Ditinjau dari sisi pengertiannya, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat lain yang bersifat sementara, yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok sebagai usaha mencapai keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup. Menurut Hunziger dan Krapf yang dikutip dari jurnal informatika, mengatakan pariwisata sebagai keseluruhan jaringan dan gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat yang penting yang memberi keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara (Tanaamah dkk,2008;151). Dilihat dari pengertian diatas bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang mampu menghidupkan sektor lainnya yang terkait di suatu wilayah, sehingga dengan meningkatnya sektor pariwisata di suatu daerah maka sektor lain akan meningkat juga baik dalam waktu sementara maupun waktu yang terus menerus.

Kabupaten Pangandaran merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Ciamis. Undang-Undang nomor 21 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat mendasari lahirnya Kabupaten Pangandaran. Pada tanggal 25 Oktober 2012 Kabupaten Pangandaran resmi menjadi Kabupaten baru di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih. Ibukota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi.

Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata sudah saatnya mengelola secara mandiri potensi yang dimiliki. Pengelolaan potensi

wilayahsecara mandiri harus dilakukan untuk menunjukkan jati diri kota wisata kepada dunia luar. Kondisi untuk pemekaran daerah juga semakin diperkuat dengan kurangnya perhatian dari kabupaten induk dalam pengelolaan potensi wilayah di Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran dengan ikon wisatanya yaitu Pantai Pangandaran telah menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan daerah prioritas pengembangan pariwisata nasional.

Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 menyebutkan Pangandaran sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) ini mempunyai tujuan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) di tingkat Kabupaten/Kota. Selain Pangandaran masih terdapat 87 KSPN yang tersebar di 50 Destinasi Pariwisata Nasional.

Pemerintah kabupaten memfokuskan pembangunan di sektor pariwisata di berbagai wilayah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga akan meningkatkan sektor lainnya yang mendukung sektor pariwisata. Pembangunan pariwisata daerah yang berkelanjutan juga harus memenuhi keterpaduan antara lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Pemanfaatan sumber daya di sektor pariwisata harus dilakukan secara lestari dan bertanggung jawab tanpa merusak atau mengurangi nilai sumber daya yang dimiliki, sehingga upaya komersialisasi (ekonomi) selaras dengan upaya konservasi sumber daya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Kabupaten Pangandaran juga menjadi salah satu daerah yang termasuk ke dalam kawasan pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan (JBBS). Kabupaten Pangandaran dalam arahan rencana pembangunan JBBS masuk ke dalam Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan. Selama ini



pembangunan Propinsi Jawa Barat yang lebih ditekankan di bagian utara dan tengah menyebabkan kurang meratanya keadaan ekonomi di wilayah Propinsi Jawa Barat. Melalui Peraturan Daerah nomor 28 tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 diharapkan pembangunan Jawa Barat lebih merata dan menjadikan daerah di JBBS menjadi daerah yang mampu mandiri dalam optimalisasi sumber daya yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pemerintah daerah telah menetapkan wilayah pembangunan untuk sektor pariwisata berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki. Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran merupakan kecamatan di Kabupaten Pangandaran yang merupakan daerah yang ditunjuk sebagai wilayah pembangunan untuk sektor pariwisata. Seperti yang dikatakan Kepala Bidang Fisik Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Pangandaran menggambarkan, terdapat 10 kecamatan yang akan dibagi dalam lima Wilayah Pembangunan (WP). “Pangandaran-Sidamulih titik beratnya ke pariwisata. Jadi nanti Sidamulih menjadi penyangga Kecamatan Pangandaran” (Nurroni, 2016; <http://swarapangandaran.com/news/pangandaran-jadi-pusat-kegiatan-parigi-pusat-pemerintahan/>, diakses pada tanggal 06 Maret 2018). Dilihat dari letak geografinya, Kecamatan Sidamulih dipilih karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pangandaran yang telah menjadi pusat pembangunan pariwisata daerah. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Sidamulih menjadi wilayah pembangunan alternatif dari pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Diharapkan ke depan akan terjadi pembangunan daerah yang merata terutama untuk sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

Ilmu geografi pada dasarnya mempelajari tentang bumi beserta isinya serta hubungan antara keduanya. Semakin meningkatnya tuntutan dan kebutuhan manusia, hal tersebut tidaklah hanya pada mengetahui dan mempelajari, namun harus dituntut juga mampu memanfaatkan bumi dan isinya untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan pada umumnya (Sujali, 1989:1). Pembangunan pada daerah yang sedang berkembang menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan

oleh pemerintah setempat. Pentingnya mengetahui kondisi fisik dan unsur geografis yang ada di suatu wilayah menjadikan pembangunan yang dilakukan akan lebih terarah. Kondisi fisik dan unsur geografis berupa tanah, geologi, hidrologi, kemiringan, dan vegetasi mampu mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan budaya di suatu wilayah. Kondisi fisik dan kondisi sosial yang saling bersinergi dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar akan menghasilkan potensi wilayah yang bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar dan masyarakat umum secara luas.

Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Ruang bersifat lebih luas dibandingkan dengan wilayah, karena wilayah hanya mencakup di permukaan saja, sedangkan ruang berisi segala sesuatu yang ada di atas dan di bawah permukaan tersebut. Jika membicarakan masalah ruang dan wilayah dalam kaitannya kepentingan manusia maka perlunya dibuat batasan bahwa ruang pada permukaan bumi itu adalah sejauh manusia masih bisa menjangkaunya atau berguna bagi manusia (Tarigan,2005;111).

Pembangunan yang dilaksanakan oleh negara dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara dengan manfaat sebesar-besarnya pada kemakmuran kesejahteraan rakyat. Pembangunan dilakukan salah satunya atas dasar untuk kepentingan umum. Pembangunan dilakukan dengan membangun infrastruktur tertentu yang ditujukan untuk pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum tersebut membutuhkan tanah sebagai lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan (Hamidah,2012;109).Lahan yang ada di suatu wilayah mempunyai karakteristik yang beragam sesuai dengan letak dan kondisi fisik tanah tersebut, sehingga membuat penggunaan pada tanah tersebut menjadi berbeda-beda pula.Perlunya penanganan khusus sesuai karakteristik tanah tersebut, untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian yang bertujuan dalam penyajian data dan informasi pertanahan yang berhubungan dengan pembangunan sarana dan

prasarana untuk pengembangan sektor strategis yang ada di Kabupaten Pangandaran yaitu sektor pariwisata. Judul dalam penelitian yang dipilih adalah “PEMANFAATAN PETA TEMATIK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PARIWISATA DAERAH DI KECAMATAN SIDAMULIH DAN KECAMATAN PANGANDARAN, KABUPATEN PANGANDARAN”

#### B. Rumusan permasalahan

Dalam mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, perlu dilakukan pembangunan di sektor pariwisata. Bidang pertanahan diperlukan dalam pembangunan di sektor pariwisata, terutama dalam evaluasi lahan dalam penyediaan dan penetapan lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Pangandaran. Penetapan lokasi ini dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tata ruang yang berlaku di suatu daerah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tata ruang yang bisa menjadi acuan dalam penetapan lokasi tersebut. Akan tetapi, seandainya belum ada rencana penggunaan lahan yang dimaksudkan ataupun kalau ada tetapi tidak cukup detail/rinci maka perencana wilayah harus mengkaitkan lokasi proyek dengan kebijakan penggunaan lahan yang baik atau mengikuti prinsip-prinsip penggunaan lahan yang baik (Tarigan, 2005:25).

Penetapan lokasi yang tepat dan sesuai untuk pembangunan dan pengembangan Pariwisata daerah di Kabupaten Pangandaran diperlukan agar pembangunan berjalan efisien dan tidak terkendala masalah pertanahan dan penataan ruang. Penelitian dan pengembangan yang berorientasi kepada sektor pariwisata penting dilakukan untuk menyediakan informasi dan data pertanahan mengenai sebaran infrastruktur yang ada sebagai penunjang di sektor pariwisata dan evaluasi lahan untuk pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

Data dan informasi harus menggambarkan kenyataan suatu daerah yang akan diteliti. Data dan informasi tersebut bersumber dari Instansi yang terkait, selain itu data dan informasi tersebut juga bisa didapat dari hasil survey di lokasi penelitian. Data dan informasi yang berhubungan dengan keruangan bisa didapat dari berbagai macam peta tematik dan data wilayah mengenai kawasan tersebut. Analisis yang tepat terhadap data dan informasi tersebut juga sangat diperlukan sehingga hasil dari penelitian akan benar-benar mencerminkan keadaan dari kawasan tersebut sehingga mampu memberikan dampak yang berarti bagi pembangunan kepariwisataan daerah di Kabupaten Pangandaran.

Dari latar belakang dan rumusan permasalahan diatas maka bisa disimpulkan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa saja jenis sarana dan prasarana serta faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran?
2. Wilayah mana saja yang mempunyai potensi paling baik untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis jenis dan sebaran sarana dan prasarana serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran.
- b. Mengetahui dan meneliti daerah yang mempunyai potensi yang paling baik untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan mengenai ketersediaan tanah bagi pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pengembangan berbagai jenis pariwisata di Kabupaten Pangandaran.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPPARDA) di Kabupaten Pangandaran.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu: (1) Sarana kesehatan; (2) Sarana perekonomian; (3) Sarana hiburan; dan (4) Sarana telekomunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kondisi sosial. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) faktor yaitu: (1) Penggunaan lahan; (2) Jumlah jaringan jalan; (3) Tingkat kepadatan penduduk; (4) Tingkat kerawanan bencana banjir; (5) Tingkat kerawanan bencana tanah longsor; (6) Tingkat kerawanan bencana tsunami; (7) Tingkat kerawanan bencana cuaca ekstrim; (8) Tingkat kerawanan bencana gempa bumi; (9) Jumlah objek wisata; dan (10) Tingkat kemiringan lahan.
2. Daerah yang paling berpotensi sebagai wilayah untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran ada 4 desa yaitu Desa Wonoharjo, Desa Babakan, Desa Pananjung dan Desa Pangandaran yang terletak di Kecamatan Pangandaran. Desa-desa tersebut terdapat pada kelas III dengan interval nilai pembobotan yaitu 42 sampai dengan 51.

#### **B. Saran**

1. Perlunya peran pemerintah dan masyarakat terkait dalam pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan, teknologi, perdagangan

dan perindustrian, perekonomian dan keamanan pada sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah terutama di desa yang berada di kelas I dan II, sehingga ke depannya daerah tersebut bisa menjadi kawasan yang siap untuk bersaing di sektor pariwisata.

2. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk acuan zonasi wilayah terkait daerah yang akan berpotensi sebagai kawasan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran. Zonasi kawasan ini bisa diketahuidari desa-desa yang mempunyai kelas potensi yang sama dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai arahan pembangunan sarana dan prasarana sehingga berjalan lebih efektif dan terarah.

## DAFTAR-PUSTAKA

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran. (2017). *Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021*. Pangandaran : BPBD Kabupaten Pangandaran.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran. (2015). *Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pangandaran*. Pangandaran : BAPPEDA Kabupaten Pangandaran.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran. (2017). *Profil Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017*. Pangandaran : BAPPEDA Kabupaten Pangandaran.
- Direktorat Pemetaan Tematik Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2012). *Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan*. Jakarta : BPN RI.
- Deritasari, Mahadika Tegar, Hananto, Untung Dwi, & Indarja. (2014). Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara. *Diponegoro Law Review*, 3(2), hlm. 1–10.
- Hamidah, Upik. (2012). Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Pengembangan Wilayah. *Seminar Nasional Peranan Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah*. Magister Teknik Sipil UNILA, Bandar Lampung, 3 Mei 2012. hlm. 109-120.
- Hardjowigeno, Sarwono., dan Widiatmoko. (2007). *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Lahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartono, Rudi, Dumasari, & Utami, Pujiati. (2007). Pengaruh Pengembangan Sektor Pariwisata Terhadap Produksi Padi Sawah Di Kabupaten Purbalingga. *Agritech, Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, IX(2), hlm. 144–162.
- Hidayat, Anwar. *Regresi Berganda*. diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/06/berbagai-jenis-regresi-berganda.html>. pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 23.33.
- Kartasapoetra, A.G, dan M.M Sutedjo. (2010). *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Purwanto, Ajun. (2013). Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Pariwisata Pantai Kura-Kura Di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Edukasi*, 11(2), hlm. 141–151.
- Nurroni, Andi. *Pangandaran Jadi Pusat Kegiatan, Parigi Pusat Pemerintahan*. diakses dari <http://swarapangandaran.com/pangandaran-jadi-pusat-kegiatan-parigi-pusat-pemerintahan/>, pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 22:08.
- Rahma, Femmy Nadia., & Handayani, Herniwati Retno. (2013). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(2), hlm. 1–9.
- Spillane, James J. (1987). *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujali. (1989). *Geografi Pariwisata dan Kepariwisataaan*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Suwantoro, Gamal., 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Tanaamah, Andeka Rocky., & Wardoyo, Retantyo. (2010). Perancangan Dan Implementasi Webgis Pariwisata Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Informatika*, 9(2). hlm.150-158.
- Tarigan, Robinson. (2009). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yoeti, Oka A. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yunus, & Budiyanto. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen*, 3(12), hlm. 1–119.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* ; Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana* ; Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat* ; Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

*Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional.* Jakarta ; Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

*Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 ;* Bandung ; Pemerintah Provinsi Jawa Barat.